

Dualitas Strukturasi Giddens : Risiko Politik Investasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Niken Eriana Azzahra Fauzi

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Shalvena Aura Azzura

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Khoirun Nisa

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Korespondensi penulis: nikeneazzahra@gmail.com

***Abstract.** The Power of the State Apparatus As a government institution in the perspective of moving the State Capital becomes part of the practice of social reproduction. Various considerations wrapped in political consensus are a challenge for bureaucrats. It is suspected that his involvement in carrying out his duties and responsibilities simultaneously has an impact on the domino effect that arises as a response to transcendental transformation. The grand factor driving the transfer of IKN is such as population agglomeration on the island of Java, which has an impact on economic stagnation which is increasingly apprehensive. In other words, the underdevelopment experienced by regions outside Java will soon be resolved. The symptom of duality in the structuring of agent behavior becomes so essential considering that the agent, namely the bureaucrat, is the key person as well as a vessel for social reproduction. Thus, it is hoped that Giddens' conception in the corridor of internal bureaucratic structuring in the search for resources as a nation accelerator can be realized properly. This is in line with the transformation of community development which requires institutional elements to accommodate all levels of stakeholders. Giddens' concept emphasizes how patterns of power relations, systems and structures unite in building the evolution of a theologically patterned society. The duality approach between the possessors of power and their powers will influence each other on an ongoing basis. More than that, the connection between political phenomena in creating opportunities will be very radical when an actor expects to optimize the capacity of his actions to influence other elements. Various speculations from minority groups to the voice of environmental elements over the transfer of the national capital are purely based on an oligarchic profit-sharing project. This skeptical assumption overshadows the fact that the development transformation synergy is fraught with risks for the possibilities that will occur. Especially regarding investment-motivated funding for the state capital project, it will confront the role of bureaucrats in a metaphorical setting in the growth of national economic capacity. It is claimed that the megaproject will participate in mobilizing supporting resources that cannot be separated from the comparison of science and technology development.*

Keywords: *IKN Paradox, Geopolitics structure, Power, Domino Effect*

Abstrak. Kekuasaan Aparatur Negara selaku lembaga pemerintahan dalam perspektif pemindahan Ibu Kota Negara menjadi bagian dari praktik reproduksi sosial. Berbagai pertimbangan dengan balutan konsensus politis menjadi tantangan birokrat. Keterikatannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya disinyalir secara simultan berdampak pada *domino effect* yang timbul sebagai jawaban atas transformasi transendental. Adapun *grand factor* pendorong pemindahan IKN seperti aglomerasi kependudukan di pulau jawa sehingga berdampak pada stagnasi ekonomi yang semakin memprihatinkan. Dengan kata lain, keteringgalan pembangunan yang dialami wilayah diluar pulau jawa akan segera teratasi. Gejala atas dualitas dalam strukturisasi perilaku *agent* menjadi begitu esensial mengingat *agent* yakni birokrat sebagai *key person* sekaligus wadah reproduksi sosial. Sehingga, diharapkan adanya konsepsi Giddens dalam koridor strukturasi internal birokrasi dalam pengupayaan sumber daya sebagai akselerator bangsa dapat terwujud dengan baik. Hal ini sejalan dengan transformasi pembangunan masyarakat yang menghendaki adanya unsur-unsur kelembagaan dalam mengakomodir seluruh lapisan *stakeholders*. Konsep Giddens menekankan pada bagaimana pola relasi kekuasaan, sistem dan struktur bersatu padu dalam membangun evolusi masyarakat yang bercorak teologis. Pendekatan dualitas antara pemilik kekuasaan dan kekuasaannya akan saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Lebih dari itu, keterkaitan adanya gejala politis dalam menciptakan peluang akan sangat radikal ketika seorang pelaku mengharap optimalisasi kapasitas tindakannya dalam mensugesti unsur lain. Berbagai spekulasi dari golongan minoritas hingga penyuaaran unsur lingkungan atas pemindahan ibu kota negara murni berbasis pada proyek bagi hasil oligarki. Asumsi *skeptic* tersebut menggelapkan fakta bahwa sinergi transformasi pembangunan tersebut penuh dengan risiko atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terlebih perihal pendanaan proyek ibu kota negara yang bermotif investasi akan menghadapi peran birokrat pada tatanan metafora dalam pertumbuhan kapasitas ekonomi nasional. Megaprojek tersebut diklaim akan turut serta mengerahkan sumber daya pendukung yang tidak lepas dari komparasi pembangunan IPTEK.

Kata kunci: Paradoks IKN, Struktur geopolitik, Kekuasaan, Efek Domino

LATAR BELAKANG

Transisi Ibu Kota merupakan agenda transformatif dalam pelaksanaannya yang berhubungan satu sama lain. Sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi Indonesia emas 2045 yang dirancang berdasarkan data KLHK, letak posisi IKN berada di dua Kabupaten strategis yakni Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Proyek yang menelan lahan kurang lebih 56,180 hektar diharapkan dapat memberikan akses pemerataan pembangunan di luar pulau jawa dan berorientasi Indonesia-sentris. Mengingat beban pulau Jawa khususnya Jabodetabek yang sudah *overload*. Adapun alat mobilisasi pengadaan proyek IKN akan banyak berdampak pada keterlibatan

stakeholders dan masyarakat aktif yang saling berkesinambungan. Partisipasi dari setiap unsur sipil sedikit banyak mengalami tekanan dan intervensi dari pusat menuju daerah. Upaya aparat seperti birokrasi sebagai representasi pusat akan bergerak menjadi *agent of action* di setiap liniya. Geopolitik struktur yang menaungi lokasi dan keadaan Ibu Kota Negara menjadi kajian strategis yang memiliki kaitan erat dengan kebijakan politis. Hafeznia, MR (2006) memaparkan bagaimana geopolitik memberikan timbal balik yang terjadi oleh karena interaksi yang timbul dari kombinasi politik, geografis dan kekuasaan. Pengelolaan lahan yang telah di kuasai Negara dibawah kuasa kontraktor Perseroan Terbatas menjadi polemik proyek bagi-bagi hasil dari pemilu tahun lalu. Lahan IKN secara yuridis dimiliki kalangan tertentu dengan asumsi timbal balik kombinasi politik kekuasaan. Selebihnya struktur dari interaksi kekuasaan yang mengakomodir pembebasan lahan bekas tambang di IKN menjadi tugas pemerintah sebagai *justificator*. Sebut saja beberapa bekas galian lahan tambang yang ikut dalam revitalisasi masih menjadi persoalan selain isu geologi dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, lahan bekas tambang dengan nilai ekonomis rendah menjadi korelasi politis atas struktur kekuasaan yang saling berinteraksi.

Dalam pelaksanaanya, kekuasaan sebagai pihak otoriter telah melekat di tiap-tiap elemen pemerintahan sebagai pelaksana pemindahan proyek IKN. Berdasarkan pemaparan mengenai paradox hingga bagaimana kekuasaan pemindahan Ibu Kota Negara telah dideskripsikan di atas, maksud dari penelitian ini adalah melihat keterkaitan pemindahan Ibu Kota dan risiko politik investasi yang dikaji dengan Teori Strukturasi milik Anthony Giddens. Dalam bukunya yang bertajuk "*Constitution of Society*", Giddens bermaksud menguraikan dan menyelesaikan permasalahan besar antara "*Structure*" dan "*Agency*". Kekuasaan yang dimiliki seorang agen akan berpengaruh terhadap reproduksi sosial kedepan. Hal ini akan dilegalkan melalui legitimasi birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan korelasi bagaimana tindakannya dapat mempengaruhi berbagai kemungkinan dan resiko yang akan didapat. Sehingga efek dalam konteks pengadaan proyek IKN akan menemui sejumlah hambatan oleh karena proses agen dalam mengkonstruksikan kewenangan mengalami gangguan sebagai akibat dari disfungsi reproduksi sosial dalam pusaran kelembagaan.

Menarik ketika kewenangan tersebut diimplementasikan pada efek yang muncul secara simultan dan berkesinambungan. Domino Effect seperti yang dijelaskan oleh Ma'arif, S (2019) dalam sebuah penelitian Relasi Birokrasi dan Politik dalam Konteks Democratic jelas hubungannya. Penelitiannya menitikberatkan pada relasi antar agent sebagai birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah intervensi politik. Demikian penjelasan dari QODRI et al. (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Birokrasi dalam Pelayanan Perizinan Investasi di Provinsi Jambi dalam ruang otonomi daerah untuk menyelenggarakan investasi sebagai konsekuensi pembiayaan rumah tangga sendiri. Tendensi pengumpulan biaya tersebut diasumsikan sebagai bentuk untuk menggerakkan ekonomi daerah yang berimplikasi pada lapangan pekerjaan. Berdasarkan penelitian di atas, risiko politik menjadi variabel yang mempengaruhi dampak dari investasi tersebut. Evolusi atas peran agent sebagai alat reproduksi sosial dapat menghantarkan kita pada domino effect sebagai suatu bagian dari salah satu rumusan masalah yang belum cukup konkret di penelitian sebelumnya. Belum adanya pembahasan inti atas dampak risiko politik terutama pada hasil investasi atas reproduksi sosial kelembagaan menjadikan peneliti berupaya mengisi ruang kosong dengan penelitian yang berjudul “Dualitas Strukturasi Giddens: Risiko Politik Investasi Pemindahan Ibu Kota Negara”.

KAJIAN TEORITIS

Paradoks Ibu Kota Negara menjadi ambisi pemerintah pusat sebagai bentuk implementasi isu ekologi dan kemanusiaan. Pengertian Ibu Kota menurut Gottman dan Harper adalah

“The capital is by definition a seat of power and a place of decisionmaking processes that affect the lives and the future of the nation ruled, and that may influence trends and events beyond its borders. Capitals differ from other cities: the capital function secures strong and lasting centrality; it calls for a special hosting environment to provide what is required for the safe and efficient performance of the functions of government and decision-making characteristics of the place”.

Adapun tujuan dan urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN adalah sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi di masa depan. Selain itu, upaya pembangunan IKN diharapkan dapat mengubah pembangunan ekonomi nasional menjadi Indonesia-sentris, sekaligus merealisasikan visi Indonesia emas 2045. Geopolitik menurut pandangan seorang Frederick Ratzel (1897) menurut teori geopolitiknya adalah bagaimana bangsa/negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (termasuk bagaimana hukum menaunginya) merupakan bangsa yang dominan yang dapat bertahan hidup. Kekuasaan (power) akan didasari pada suatu keadaan yang menyebabkan suatu sumber daya dapat diorganisir. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Sehingga pada saat yang bersamaan akan terjadi suatu dampak (*domino effect*) yang menyebar. Demikian halnya peranan unsur-unsur diatas saling berkaitan membentuk suatu hipotesis dalam koridor dualitas strukturasi Giddens pada bagaimana kinerja birokrasi terhadap risiko politik investasi pemindahan Ibu Kota Negara serta bagaimana dampaknya secara ekonomi-sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif, yang mana hasil risetnya dapat memberikan penjelasan lebih kepada analisis dan bersifat subjektif. Wolcott (2008) dalam pendekatan etnografi karyanya mencakup pendekatan realis dan kritis sebagai rujukan utama peneliti. Adapun teori yang digunakan berasal dari teori strukturasi dualitas milik Anthony Giddens yang menjelaskan 2 konsep pokok yakni 1) Struktur, Sistem dan Reproduksi sosial dan 2) Perubahan, Evolusi dan Kekuasaan sebagai intisari pembahasan. Subjek atau informan sebagai sumber yaitu 1) Aktivistis Lingkungan Hidup, 2) Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Sumber penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Sugiono (2018) menjelaskan data primer terdiri dari hasil wawancara peneliti bersama subjek penelitian. Data sekunder terdiri dari hasil observasi, pengamatan, dan dokumentasi yang diperoleh peneliti baik dari laman *website* ataupun studi dokumentasi dari tempat kejadian perkara.

Teknik pengumpulan data peneliti dapat dari hasil observasi dan pengamatan melalui sudut pandang informan dan peneliti. Wawancara bersama informan secara daring dihadirkan untuk mendapatkan data yang valid dan konkret di lapangan tanpa perlu terjun langsung. Lokasi penelitian sebagai fokus tempat kejadian perkara ialah di Kota Panajam Paser Utara. Pengolahan hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif sebagaimana Lincoln dan Guba (1985) mengenai penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan tema menuju makna yang lebih luas dari data. Adapun prosesnya terdiri dari reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Perlunya mempertajam data yang berkaitan dengan Risiko Politik Investasi di Kota Panajam Paser Utara dimaksudkan supaya data dapat dikelompokkan dan ditarik kesimpulan. Sehingga poin-poin penelitian berisikan inti yang diperingkas ketika disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Domino Effects Sebagai Dampak Dari Risiko Politik

Kesenjangan akan terjadi dan tidak dapat dihindari mengingat kesenjangan adalah suatu hal yang selalu muncul jika ada perbedaan komposisi atas dua hal. Dalam konteks persoalan ini, dua hal yang dimaksud ialah mengenai ibukota yang saat ini dengan yang akan diwacanakan. Secara topografi bahkan juga potensinya, mungkin di waktu yang sekarang ini Jakarta lebih unggul ketimbang Kalimantan Timur karena baik infrastruktur maupun segala aspek yang mengikutinya sudah dapat digolongkan lengkap. Berbeda jauh dengan Kalimantan Timur yang bahkan keunggulan utamanya dinilai dari kekosongan area yang masih banyak, harga tanah yang masih relatif murah, serta keadaan penduduk yang sama sekali tidak padat. Rencana atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur memiliki dampak positif seperti terdapat penambahan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ada, dan tentu aspek-aspek lain juga akan mengikuti di belakangnya seperti lapangan pekerjaan yang dibuka lebar yang berimpak pada jumlah pengangguran akan lebih berkurang. Terlebih lagi apabila sumber daya manusia yang berada di wilayah dengan padat penduduk akan dengan sukarela untuk pindah ke wilayah yang jarang penduduk demi mendapatkan kesempatan dalam segi pekerjaan.

Demikian halnya dengan realitas masyarakat sekitar yang disuguhkan fenomena pergeseran tatanan sosial. Mereka dikehendaki untuk siap mengikuti alur transisi ekonomi dari segi pekerjaan dan pemberdayaan lahan. Disisi lain mereka diharuskan untuk bertahan di tengah gempuran pengambilalihan lahan untuk keperluan sektor perdagangan dan investasi. Konsep bertahan hidup lebih tepat menggambarkan ironitas masyarakat sekitar Penajam Paser Utara dalam menghadapi keberingasan perusahaan oleh karena dampak dari pemindahan ibu kota negara. Pada dasarnya, praktik sosial adalah segala sesuatu yang diupayakan dapat meningkatkan maupun mendukung apa yang sedang diwacanakan (dalam konteks tertentu). Dalam kaitannya dengan topik yang diangkat yakni mengenai IKN, salah satu wujud nyata sebagai bagian dari praktik sosial adalah dari unsur produksi atau pembangunan IPTEK. Produksi IPTEK sebagai bagian dari praktik sosial sangat penting karena guna dari kegiatan tersebut akan berdampak langsung pada wacana yang dituju. Kompleksitas ini akan berguna dalam persiapan preparasi IKN, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan adalah pusat dari apa yang kita cari. Tentunya, sebelum adanya wacana pemindahan IKN, sumber daya manusia yang ada harus dipersiapkan, salah satunya dengan melalui pendekatan IPTEK. Tak hanya di awal saja, namun persiapan pemaksimalan bidang IPTEK juga dilakukan di akhir setelah nantinya IKN sudah dinyatakan resmi dipindahkan. Jika kemudian ditanya mengenai urgensi, maka bisa dikatakan ini cukup penting, terlebih kaitannya dalam mengantisipasi efek domino yang sudah diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Struktur, Sistem dan Reproduksi Sosial

Pada dasarnya dalam teori strukturasi ada konteks pembahasan dualisme, maka tentu di dalamnya pun kita harus menyinggung perihal konsep yang terpakai dalam dualisme yang dimaksud, yakni unsur subyektivisme dan obyektivisme. Dualisme ini tentu akan sangat bertolak belakang karena dengan jelas subyektivisme lebih mengarahkan ke penjelasan bagaimana tiap individu bisa mengartikan sesuatu hal menurut kehendaknya. Lain dengan obyektivisme yang memang mengarahkan pandangannya ke arah bagaimana suatu komunitas (banyak orang) berpikir, dalam artian obyektivisme lebih terfokus kepada pandangan sesuatu hal secara umum. Inti dari struktur yang dimaksudkan yakni merupakan hasil titik temu atas pengakomodiran antara

kekuatan sosial (dominasi struktur) dan agen yang menjalankan (pelaku tindakan). Pihak atau pelaku tindakan (agen) yang punya wewenang atas proyek IKN yang dimaksud ialah PUPR (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang). Secara resmi, mereka memiliki tugas dalam meng-*handle* urusan pemerintahan yang didalamnya meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, sekaligus urusan dalam pertahanannya. Dalam proyek ini, salah satu kekuatan yang dibangun dan coba untuk dikedepankan ialah pada UU yang diberlakukan yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Hal ini kemudian menjadikan proyek IKN berlandaskan hukum yang resmi. Perencanaan IKN pada kenyataannya sudah tersusun dimulai dari tingkat *Master planning*, *Spatial planning*, dan *Conceptual planning* sebagai acuan pembangunan yang memperhatikan isu pengembangan lingkungan, masyarakat, dan teknologi.

Kaitannya dengan topik IKN ini, karena pada dasarnya yang menjadi agen atau pelaku yang menjalankan proyek salah satunya adalah Dinas PUPR, maka dapat dikatakan pula bahwa PUPR adalah lembaga kementerian yang bertanggung jawab atas reproduksi sosial yang diwacanakan terbangun. Reproduksi sosial yang dimaksud ialah alur yang memastikan terulangnya kembali struktur sosial dari waktu ke waktu. Dari definisi ini, tentu kita juga bisa langsung mengerti jika hal ini kemudian ada hubungannya dengan *sustainability*, yang mana konteksnya pun akan bisa meluas merujuk pada segala aspek kehidupan. Seperti yang telah dipaparkan pada uraian bagian sebelumnya, tentu proyek IKN yang mengundang pro dan kontra ini pada akhirnya juga akan punya efek domino di dalamnya. Seperti yang kita ketahui pula, apabila permasalahan kepindahan ibukota ini ditinjau dengan teori strukturasi, tentu di dalamnya akan ada dua perspektif berbeda yakni subyektivasi dan obyektivasi.

Perubahan, Evolusi dan Kekuasaan

Pandangan Giddens mengenai agen dalam perubahan mengutarakan bahwa agen perubahan bukanlah tercipta dari kesadaran kolektif, akan tetapi dari dalam individu yang mendambakan perubahan tersebut. Pandangan tersebut selaras dengan yang terjadi pada fenomena pemindahan IKN, yang mana motivasi agen dalam melakukan pemindahan lahir dari dalam diri agen melalui analisisnya mengenai lingkungan yang disebabkan karena pengaruh struktur Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menjadi IKN. Agen berupaya melakukan aksi guna merubah struktur yang ada menjadi lebih baik. Hal ini

dikarenakan hierarki pada struktur adalah sebagai agen nyata dalam keberlanjutan sebuah perubahan. Peran dan upaya yang dilakukan oleh agen perubahan tersebut tentunya tidak serta-merta dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat, tetapi membutuhkan waktu serta melalui berbagai proses yang bertahap. Sebab masyarakat memerlukan kurun masa yang tidak sebentar juga penyesuaian tersendiri untuk meninggalkan rutinitas mereka dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru atas pemindahan IKN.

Dominasi kekuasaan sebagai konsep lain dari dimensi dualitas strukturasi memiliki sangkut paut dengan agen dalam melakukan prakteknya. Agen dituntut untuk mampu menggunakan gugusan kausal tidak terkecuali menundukkan kekuasaan-kekuasaan yang disebarkan orang lain. Jika agen tidak memiliki daya kekuasaan, maka ia tidak lagi dapat mempengaruhi kekuasaan semacam itu lagi. Dalam ranah ini, penggunaan kekuasaan membentuk sikap yang menyeluruh pada setiap tindakan dan tidak terpaku pada satu pola khusus perbuatan. Maka daripada itu, sebuah kekuasaan bukanlah dimaknai sebagai suatu sumberdaya tetapi sumberdaya-sumber daya ini menjadi medium dalam memangku kekuasaan, sebagai unsur rutin kesegeraan suatu tindakan dalam reproduksi sosial baik yang bersifat alokatif maupun otoritatif. Pada praktek kasus ini, PUPR sebagai agen mempunyai kapasitas dalam melakukan intervensi kebijakan strategis atas pemindahan IKN.

KESIMPULAN

Pengadaan proyek investasi Ibu Kota Negara, investor dan agent birokrat senantiasa menciptakan konstruksi sosial untuk menjaga stabilisasi ekonomi nasional. Dilain pihak, adanya unsur kepentingan yang bersifat politis rentang menjadi gesekan kekuatan bagi setiap aparatur negara. Strukturisasi yang menitikberatkan pada moral, pemahaman dan kekuasaan tidak luput dari peran aktor yang berkorelasi dengan aktor lain untuk mensukseskan efisiensi tanggung jawab pekerjaan. Dualitas struktur dari konsep *agent* dengan sistem kelembagaan begitu bersinggungan dengan kekuatan dan gesekan politis. Sebagai masyarakat modern yang hidup berdemokrasi, intervensi pihak birokrasi atas pemerintah akan selalu mengikuti. Adanya reproduksi sosial termasuk didalamnya termaktub elemen regionalisasi sistem akan selalu berjalan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi pembiayaan dan pengadaan IKN akan selalu memiliki dampak yang meluas seperti halnya *domino effect*.

Pandangan Giddens mengenai agen dalam perubahan mengutarakan bahwa agen perubahan bukanlah tercipta dari kesadaran kolektif, akan tetapi dari dalam individu yang mendambakan perubahan tersebut. Pandangan tersebut selaras dengan yang terjadi pada fenomena pemindahan IKN, yang mana motivasi agen dalam melakukan pemindahan lahir dari dalam diri agen melalui analisisnya secara evolutif mengenai lingkungan yang disebabkan karena pengaruh struktur Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menjadi IKN. Terlebih, PUPR sebagai agen mempunyai kapasitas dalam melakukan intervensi kebijakan strategis atas pemindahan IKN. Kekuasaannya sebagai representasi pemerintah pusat menjadikan posisinya fundamental terhadap segala kemungkinan yang terjadi secara ekologis. Perilaku agen sebagai bagian dari reproduksi sosial sekaligus pengontrol sosial akan berperan untuk mewujudkan kebutuhan ekonomi pembangunan yang berkelanjutan. Investasi dalam dorongan peran agent akan diperlakukan istimewa sejalan dengan visi misi yang telah menjadi konsensus bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian, Apriani, R. (2021). Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia. *ECONOMIC EDUCATION ENTREPRENEURSHIP JOURNAL*.
- Drajat, E.U. (2022). Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis E-QIEN*.
- Effendi, T. (2013). Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. *Konstitusi Pers*.
- Endah, K., Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*.
- Fernando, A. (2022). Politik Hukum Peningkatan Investasi dan Dampaknya Terhadap Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Lex Renaissance*.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*.
- Hafrienda, R. (2019). Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian Daerah. *Jurnal ACADEMIA*.
- Pandjaitan, S.P. (2016). Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*.
- Ramadani, Laili Nur. dkk. 2019. "Analisis Pengaruh Economic Risk dan Country Risk Terhadap Fluktuasi Foreign Direct Investment di Indonesia Tahun 2000-2018". *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau*. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Rosa, Vidia Dien. dkk. 2021. "Social Relations Between Markets and Farmers: A Sustainable Development Model for Coffee Commodities." International Conference on Management, Business, and Technology (ICOMBEST 2021).

Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa

Vol. 2, No. 2 Mei 2023

e-ISSN: 2963-5438; p-ISSN: 2963-5004, Hal 188-198

- Rusfiana, Y., Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Alfabeta Bandung.
- Siladin, A. (2019). Peran Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Ekonomi Indonesia:Politik, Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi. *Jurnal ResearchGate*.
- Subhan. M. (2015). Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Universitas Jember*.
- Wiranti, J. S. 2012. "Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing di Jawa Timur." unair.ac.id. <http://journal.unair.ac.id/>
- Zakariyah, H., Santosa, H., Ganta, F.D.M., & Anjani, R.A. (2017). Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*.
- Ganefo, A., Santoso, Budhy. (2013). Perempuan Pekerja Borongan Pemungut Ikan di Pesisir Dusun Getem Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- Bilquis, L., Hidayat, Nurul. (2020). Kekuasaan dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas pada Seksualitas Pemuda. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*.